

JANUARI - FEBRUARI 2026

Inside PERBANAS



perbanas.org



[Perbanas_Official](https://www.instagram.com/Perbanas_Official)

Table of Contents

- 01** Coretax: Menguatkan Peran Strategis Perbankan dalam Transformasi Perpajakan
- 03** ILAAP 2026: Menguatkan Ketahanan Likuiditas di Tengah Dinamika Risiko ILAAP Implementation Forum 2026
- 05** From Risk to Opportunity: Mendorong Forest-Positive Finance melalui Due Diligence Strategis
- 07** Menguatkan Arah Strategis 2026: PERBANAS Menyusun Respons Industri di Tengah Dinamika Global
- 09** Rezim Hukum Baru dan Aksi Korporasi: Memperkuat Tata Kelola di Era KUHP & KUHPA 2025
- 11** Agenda Riset 2026
Dari Koordinasi ke Orkestrasi Strategis
- 12** Kolaborasi untuk Ketahanan Iklim: PERBANAS Hadiri Konsolidasi HUB Terumbu Karang Nasional
- 14** Sinergi Pengawasan dan Industri: Pertemuan PERBANAS dengan Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK
- 16** PERBANAS Hadiri FGD Keuangan Berkelanjutan OJK: Memperkuat Peran Industri dalam Agenda Transisi Hijau
- 18** From Commitment to Implementation:
Perkuat Integrasi TKBI dalam Proses Kredit

Coretax: Memperkuat Peran Strategis Perbankan dalam Transformasi Perpajakan

Sosialisasi Coretex – PERBANAS Daerah Sumatera Utara
21 Januari 2026 | Medan



Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax menandai fase baru dalam tata kelola kepatuhan nasional. Dalam konteks ini, perbankan tidak hanya berperan sebagai pengguna sistem, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh PERBANAS Daerah Sumatera Utara bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Sumatera Utara I menjadi langkah penting dalam menyelaraskan pemahaman antara regulator dan industri terkait implementasi sistem baru tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperdalam pemahaman perpajakan di kalangan bank-bank anggota PERBANAS.

Dalam forum ini, perhatian utama diberikan pada penguatan pemahaman bank anggota terhadap alur dan implikasi implementasi Coretax. Dengan pemahaman yang seragam, perbankan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam mendukung kepatuhan perpajakan masyarakat.

Bank tidak hanya memastikan kepatuhan internal, tetapi juga berkontribusi dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada nasabah orang pribadi agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan.

Diskusi interaktif dalam kegiatan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak semata-mata bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan.

Coretax bukan sekadar sistem baru, melainkan perubahan paradigma pengelolaan kepatuhan pajak nasional.

Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, perbankan memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran transisi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang semakin digital dan terintegrasi.



Secara lebih luas, kegiatan ini mencerminkan komitmen PERBANAS untuk terus mengawal implementasi kebijakan nasional melalui pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada solusi. Sosialisasi Coretax bukan sekadar agenda teknis, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan negara serta memastikan transformasi kebijakan berjalan seiring dengan kesiapan industri.

Secara lebih luas, kegiatan ini mencerminkan komitmen PERBANAS untuk terus mengawal implementasi kebijakan nasional melalui pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada solusi. Sosialisasi Coretax bukan sekadar agenda teknis, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan negara dan memastikan transformasi kebijakan berjalan seiring dengan kesiapan industri.



ILAAP 2026: Memperkuat Ketahanan Likuiditas di Tengah Dinamika Risiko ILAAP Implementation Forum 2026

ILAAP Implementation Forum 2026
PERBANAS & Bankers Association for Risk Management (BARa)
27 Januari 2026 | Griya Perbanas, Jakarta



Di tengah dinamika risiko yang semakin kompleks serta meningkatnya ekspektasi regulator terhadap pengelolaan likuiditas, penguatan kerangka Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) menjadi agenda strategis bagi industri perbankan nasional. Implementasi ILAAP menuntut bank untuk memastikan kecukupan likuiditas secara berkelanjutan melalui pendekatan yang berbasis risiko dan terintegrasi dengan strategi bisnis.

PERBANAS bekerjasama dengan Bankers Association for Risk Management (BARa) menyelenggarakan ILAAP Implementation Forum 2026 sebagai ruang strategis bagi bank-bank anggota untuk memperdalam pemahaman serta menyelaraskan persepsi mengenai implementasi kerangka ILAAP.

Forum ini mempertemukan praktisi risiko, likuiditas, dan manajemen bank untuk mendiskusikan praktik terbaik serta tantangan implementasi yang dihadapi di lapangan.



Dalam diskusi forum, ILAAP ditegaskan bukan sekadar kewajiban pelaporan kepada regulator, melainkan instrumen manajemen strategis yang menghubungkan profil risiko, strategi bisnis, serta kecukupan likuiditas bank. Melalui pendekatan ini, bank didorong untuk secara proaktif melakukan pengujian ketahanan likuiditas melalui berbagai skenario, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi tekanan.

Pembahasan teknis dalam forum mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kerangka konseptual ILAAP, penyusunan laporan kualitatif dan kuantitatif, hingga pengelolaan likuiditas intrahari serta struktur pendanaan bank.

Diskusi juga diperkaya dengan berbagi pengalaman implementasi dari sejumlah institusi perbankan, yang menyoroti tantangan nyata seperti kesiapan data dan sistem, koordinasi lintas unit kerja, serta kebutuhan penguatan tata kelola dan dokumentasi internal.

Pendekatan diskusi yang terbuka dan aplikatif memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ekspektasi regulator sekaligus langkah-langkah praktis yang dapat diambil bank dalam mempersiapkan implementasi ILAAP secara efektif. Pertukaran pengalaman antarbank juga memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas industri menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi kerangka likuiditas berjalan secara konsisten.



*Likuiditas yang kuat
menjaga kepercayaan.
Kepercayaan
menjaga stabilitas.*



Forum ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi industri dalam menghadapi dinamika risiko yang terus berkembang. Melalui wadah pembelajaran bersama, bank tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan praktik pengelolaan likuiditas, melainkan tumbuh melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang memperkaya perspektif industri secara kolektif.

Ke depan, pengelolaan likuiditas yang kuat dan terintegrasi akan menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, memperkuat ketahanan industri perbankan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Implementasi ILAAP pada akhirnya bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang membangun sistem pengelolaan likuiditas yang adaptif, terukur, dan selaras dengan strategi bisnis jangka panjang bank.

From Risk to Opportunity: Mendorong Forest-Positive Finance melalui Due Diligence Strategis

3rd Workshop PERBANAS – Tropical Forest Alliance (TFA)
29 Januari 2026 | Griya PERBANAS

PERBANAS bersama Tropical Forest Alliance (TFA)/World Economic Forum (WEF) menyelenggarakan Lokakarya Ketiga dalam rangka memperkuat kapasitas perbankan nasional dalam pembiayaan berkelanjutan. Forum ini menekankan pentingnya integrasi kerangka due diligence dan pengembangan portofolio pembiayaan yang positif terhadap sektor lahan, pertanian, dan kehutanan, sehingga bank tidak hanya mengelola risiko deforestasi, tetapi juga mampu menangkap peluang pertumbuhan bisnis yang selaras dengan tujuan iklim dan keberlanjutan.



Lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian program Advancing Forest-Positive Financing through Capacity Building for Indonesian Banks, yang bertujuan memperkuat kesiapan industri perbankan dalam menghadapi risiko iklim dan alam yang semakin memengaruhi stabilitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, modal alam—seperti hutan, keanekaragaman hayati, air, dan ekosistem—merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Namun berbagai peristiwa bencana yang dipicu oleh deforestasi menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang tidak berkelanjutan dapat memicu risiko sistemik yang berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian.



*Risiko iklim bukan lagi
isu ESG semata,
melainkan risiko
keuangan arus utama.*

Melalui lokakarya ini, bank anggota PERBANAS diajak memperdalam pemahaman mengenai kerangka *due diligence* yang relevan dengan sektor agribisnis dan deforestasi di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan selaras dengan praktik rantai pasok bebas deforestasi serta prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Diskusi juga menyoroti bagaimana kerangka *due diligence* dapat diterapkan secara praktis dalam proses penilaian klien dan manajemen risiko portofolio. Melalui paparan para pakar dari Tropical Forest Alliance, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), serta praktisi industri, peserta mempelajari berbagai metodologi, alat analisis, serta studi kasus yang relevan dengan konteks perbankan nasional.

Selain fokus pada pengelolaan risiko, lokakarya ini juga menekankan pentingnya pengembangan portofolio pembiayaan yang positif terhadap sektor lahan, pertanian, dan kehutanan. Bank didorong untuk mengidentifikasi peluang investasi hijau yang mampu memberikan manfaat iklim, menjaga keanekaragaman hayati, serta menciptakan dampak sosial bagi masyarakat, termasuk melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan petani kecil.

Melalui sesi *portfolio clinic* dan studi kasus interaktif, peserta berlatih menerapkan kerangka *due diligence* dan alat valuasi pada situasi nyata, sekaligus menyusun pendekatan portofolio yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu bank memahami bagaimana pembiayaan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis sekaligus meningkatkan kualitas aset dan ketahanan portofolio dalam jangka panjang.



Lokakarya ini menegaskan bahwa sektor perbankan memiliki peran penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pengelolaan risiko deforestasi dan iklim ke dalam keputusan pembiayaan, bank tidak hanya melindungi stabilitas portofolio mereka, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan sumber daya alam yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi Indonesia.

Menguatkan Arah Strategis 2026: PERBANAS Menyusun Respons Industri di Tengah Dinamika Global

Rapat Badan Pengurus dan Badan Pengawas PERBANAS
30 Januari 2026 | Griya PERBANAS, Jakarta



Menghadapi 2026 yang dibayangi perlambatan global, volatilitas pasar, serta tekanan domestik terhadap konsumsi dan permintaan kredit, PERBANAS menegaskan bahwa program kerja tidak dapat lagi bersifat business as usual.

Arah strategis organisasi berfokus pada penguatan sinergi regulator, riset berbasis data, komunikasi publik, serta tata kelola yang lebih solid dan terintegrasi.

Industri perbankan nasional tetap berada dalam kondisi stabil dengan permodalan kuat dan risiko terjaga. Namun, fungsi intermediasi menghadapi tantangan akibat melemahnya permintaan kredit produktif dan UMKM, serta kecenderungan sikap *risk averse* di tengah ketidakpastian global.

Isu pasar keuangan dan dinamika persepsi publik juga menjadi perhatian, menegaskan pentingnya komunikasi yang lebih aktif dan terstruktur untuk menjaga kredibilitas industri.



2026 menuntut PERBANAS hadir sebagai mitra strategis yang aktif, solutif, dan berbasis data — bukan sekadar representasi formal industri.

Inisiatif PERBANAS *Data Center* menjadi langkah strategis untuk memperkuat advokasi kebijakan berbasis data aktual dan mempercepat insight industri.

Di sisi lain, penguatan PERBANAS Institute difokuskan pada peningkatan *governance*, pengembangan vokasi berbasis kebutuhan bank, serta kolaborasi lebih erat dengan HRD industri untuk memastikan kesinambungan talenta perbankan.



Empat Pilar Arah Strategis 2026



1 **Penguatan Sinergi dengan Regulator**

Dialog konstruktif dan berbasis kajian dengan BI, OJK, dan PPATK untuk memastikan suara industri tersampaikan secara terukur.

2 **Riset dan Data sebagai Fondasi Advokasi**

Pengembangan kajian prioritas (likuiditas, kredit, UMKM, ESG, transformasi digital) serta inisiasi PERBANAS *Data Center* sebagai *dashboard insight* industri berbasis data agregat dan anonim.

3 **Penguatan Komunikasi Publik**

Strategi komunikasi yang lebih sistematis, termasuk *podcast* edukatif dan publikasi rutin, untuk memperkuat persepsi positif serta meluruskan narasi yang mendistorsi peran perbankan.

4 **Tata Kelola dan Keberlanjutan Organisasi**

Optimalisasi aset dan investasi, penguatan transparansi keuangan, serta transformasi PERBANAS Institute agar semakin relevan dengan kebutuhan industri.

Rapat ini menegaskan bahwa 2026 adalah tahun konsolidasi arah dan penguatan fondasi.

Di tengah ketidakpastian global, PERBANAS berkomitmen memastikan industri perbankan tetap tangguh, kredibel, dan berperan aktif dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Rezim Hukum Baru dan Aksi Korporasi: Memperkuat Tata Kelola di Era KUHP & KUHP 2025

Diskusi Interaktif PERBANAS 2026
Aksi Korporasi Perbankan dalam Perspektif KUHP Baru, KUHP 2025,
dan UU Penyesuaian Pidana
3 Februari 2026 | Fairmont Hotel, Jakarta

Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHP 2025 menandai perubahan fundamental dalam lanskap hukum pidana Indonesia. Bagi industri perbankan, rezim baru ini menuntut kesiapan tata kelola yang lebih kuat dan terintegrasi.



Transformasi kerangka hukum pidana nasional melalui KUHP Baru, KUHP 2025, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana menandai perubahan penting dalam lanskap hukum Indonesia.

Bagi industri perbankan, perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan, tetapi juga menuntut penguatan tata kelola korporasi serta sistem pengendalian risiko hukum yang lebih terintegrasi.

Melalui diskusi interaktif yang diselenggarakan PERBANAS, para pimpinan dan praktisi perbankan mendalami implikasi rezim hukum baru tersebut terhadap aktivitas korporasi, khususnya dalam pengambilan keputusan bisnis, manajemen risiko, serta tanggung jawab pengurus. Forum ini menjadi ruang penting untuk memahami bagaimana perubahan regulasi pidana akan memengaruhi praktik tata kelola di sektor jasa keuangan.



KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma baru yang menekankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif, sekaligus menempatkan hukum pidana sebagai *the last resort*. Pendekatan ini juga membawa sejumlah perubahan mendasar, termasuk dalam hal penghapusan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan serta penerapan sistem *double track*, yang memungkinkan kombinasi sanksi pidana dan tindakan korektif dalam penyelesaian perkara.

Perubahan ini kemudian diperkuat melalui KUHP Baru dalam UU No. 20 Tahun 2025, yang memperkenalkan *single prosecution system* serta memperjelas pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

*Kepatuhan saja
tidak cukup.
Tata kelola yang kuat
adalah fondasi
perlindungan korporasi.*

Dalam kerangka baru tersebut, sistem peradilan pidana juga membuka ruang mekanisme penyelesaian perkara yang lebih fleksibel, seperti *restorative justice*, *plea bargain*, dan *deferred prosecution agreement*, yang memungkinkan penyelesaian perkara berbasis pemulihan kerugian dan perbaikan tata kelola tanpa selalu berujung pada proses peradilan konvensional.

Transformasi hukum pidana ini semakin dipertegas melalui UU Penyesuaian Pidana Tahun 2026, yang menata kembali berbagai ketentuan pidana di luar KUHP agar selaras dengan sistem hukum baru. Penyesuaian tersebut mencakup harmonisasi ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang sektoral, penghapusan ancaman pidana minimum khusus di luar KUHP, serta penguatan sistem kategorisasi pidana denda sebagai alternatif sanksi.



Perubahan tersebut menegaskan, hukum pidana Indonesia tengah bergerak dari pendekatan yang semata represif menuju sistem yang lebih restoratif dan berbasis tata kelola. Dalam konteks korporasi, khususnya sektor perbankan, transformasi ini memperkuat pesan bahwa kepatuhan normatif saja tidak lagi cukup.

Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem *governance, risk management, and compliance* (GRC) berjalan secara efektif, mulai dari kebijakan internal, mekanisme pengawasan, hingga kesadaran manajemen terhadap potensi tanggung jawab pidana korporasi.

Agenda Riset 2026 Dari Koordinasi ke Orkestrasi Strategis

Menghadapi dinamika kebijakan 2026, Bidang Riset dan Kajian Ekonomi & Perbankan PERBANAS melakukan silaturahmi lintas bidang untuk menyelaraskan kebutuhan riset secara strategis.

Agenda riset disusun secara terintegrasi guna memastikan relevansi, dampak, dan kesiapan industri dalam merespons perubahan.

Melalui rangkaian pertemuan dengan beberapa bidang PERBANAS, termasuk Bidang Pengembangan Produk, Bidang Pajak dan *Regulatory Reporting*, serta Bidang *Sustainability*, berbagai isu strategis berhasil dipetakan sebagai prioritas kajian tahun 2026. Di antaranya mencakup dampak kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) terhadap likuiditas dan struktur kompetisi industri perbankan, dinamika pengenaan sanksi serta administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa keuangan, serta perkembangan regulasi terkait pasar karbon, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dan program social forestry.

**Menguatkan
industri
melalui kajian
strategis.**

Diskusi lintas bidang tersebut juga menyoroti pentingnya pengembangan skema pembiayaan inovatif, termasuk pendekatan *blended finance*, yang berpotensi membuka peluang baru bagi sektor perbankan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga daya saing industri.



Riset kini menjadi *enabler* strategis yang menjadi penentu arah respons industri dalam menghadapi perubahan regulasi.

Kajian yang disusun diarahkan untuk menghasilkan analisis berbasis data, menawarkan opsi kebijakan yang implementatif, serta memberikan perspektif mitigasi risiko bagi industri perbankan.

Inisiatif ini sekaligus menegaskan peran Bidang Riset dan Kajian Ekonomi & Perbankan sebagai *think tank* strategis bagi industri perbankan nasional.

Dengan agenda yang disusun secara terintegrasi, fokus, dan berdampak, PERBANAS diharapkan dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan kesiapan industri menghadapi dinamika ekonomi dan regulasi di tahun-tahun mendatang.

Kolaborasi untuk Ketahanan Iklim: PERBANAS Hadiri Konsolidasi HUB Terumbu Karang Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan
11–12 Februari 2026 | Cikini, Jakarta



PERBANAS menghadiri Konsolidasi HUB Terumbu Karang Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung konservasi ekosistem laut yang berketahanan iklim.

Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memperkuat tata kelola konservasi terumbu karang sekaligus mendorong agenda ekonomi biru nasional.

PERBANAS menghadiri Konsolidasi HUB Terumbu Karang Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung konservasi ekosistem laut yang berketahanan iklim. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memperkuat tata kelola konservasi terumbu karang sekaligus mendorong agenda ekonomi biru nasional.

Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa National Coral Reef HUB dikembangkan sebagai platform kolaboratif yang mengintegrasikan data, program, dan kebijakan konservasi dalam satu kerangka koordinasi nasional berbasis sains. Inisiatif ini bertujuan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi serta mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga penelitian, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan ekosistem laut terhadap perubahan iklim.

Diskusi juga menekankan pentingnya integrasi pengetahuan lokal masyarakat pesisir ke dalam sistem kebijakan dan pengelolaan konservasi nasional. Praktik konservasi yang telah berkembang di tingkat komunitas dinilai memiliki kontribusi penting dalam menjaga ketahanan ekosistem, namun perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang lebih kuat agar terhubung dengan sistem perencanaan, pendanaan, dan pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Bagi sektor perbankan, forum ini membuka peluang kolaborasi dalam mendukung penguatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun proyek ini tidak secara langsung mengajukan dukungan pendanaan dari sektor perbankan, terdapat ruang sinergi melalui kegiatan sosialisasi akses pembiayaan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan pembiayaan, serta penguatan literasi keuangan bagi UMKM dan kelompok usaha masyarakat di wilayah konservasi.



PERBANAS hadir sebagai mitra strategis dalam memperluas literasi keuangan dan kesiapan pembiayaan berkelanjutan bagi ekosistem ekonomi biru nasional.



Dalam konteks tersebut, PERBANAS berpotensi berkontribusi melalui kolaborasi bersama PERBANAS daerah untuk mendukung program literasi keuangan dan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah intervensi HUB. Sinergi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal memahami peluang pembiayaan berkelanjutan sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam mengakses investasi yang mendukung pengelolaan ekosistem secara bertanggung jawab.

Partisipasi PERBANAS dalam forum ini menegaskan komitmen industri perbankan untuk tidak hanya mendukung stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru nasional.

Sinergi Pengawasan dan Industri: Pertemuan PERBANAS dengan Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK

19 Februari 2026 | Menara Radius Prawiro, Jakarta



Pengurus PERBANAS bersilaturahmi dengan Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK guna memperkuat sinergi regulator-industri dan membahas isu strategis pengembangan produk, efisiensi, serta daya saing perbankan. Dialog konstruktif ini menegaskan komitmen menjaga stabilitas sekaligus mendorong inovasi terukur.

Dalam pertemuan tersebut, PERBANAS menyampaikan sejumlah masukan terkait proses perizinan produk perbankan, khususnya perlunya integrasi mekanisme perizinan lintas otoritas antara OJK dan Bank Indonesia. Proses pengajuan izin yang masih dilakukan secara terpisah dinilai berpotensi memperlambat inovasi produk perbankan, sehingga diperlukan penyesuaian prosedur agar proses evaluasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Menanggapi hal ini, OJK menyampaikan bahwa upaya penyempurnaan mekanisme perizinan terus dilakukan dengan target waktu proses sekitar 14 hari kerja, dengan tetap mempertimbangkan kualitas analisis dan pengawasan yang memadai.

Diskusi juga menyoroti dinamika sinergi dalam grup usaha perbankan, terutama terkait praktik berbagi data dan layanan antara induk dan anak perusahaan yang masih menghadapi tantangan efisiensi, termasuk implikasi perpajakan pada transaksi internal.

Isu ini menjadi perhatian penting mengingat pembentukan grup usaha pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat kapasitas layanan perbankan.

Dialog PERBANAS dan OJK menegaskan bahwa stabilitas dan inovasi hanya dapat berjalan beriringan melalui sinergi yang terstruktur, kepastian kebijakan, dan standar yang proporsional.



Selain itu, aspek teknologi dan keamanan sistem juga menjadi fokus pembahasan. PERBANAS menekankan pentingnya pengembangan standar keamanan (*security standard*) yang selaras dengan karakteristik masing-masing kelompok bank (KBMI), mengingat perbedaan kapasitas pembiayaan dan kesiapan teknologi antar bank. OJK menyambut baik inisiatif industri untuk menyusun standar tersebut, dengan penegasan bahwa regulasi yang ada merupakan *minimum requirement* dan tidak dimaksudkan untuk menerapkan pendekatan yang seragam bagi seluruh bank.



Pertemuan ini juga membahas isu penguatan permodalan bank, khususnya terkait rencana peningkatan modal minimum bagi bank KBMI 1 dan 2 hingga Rp6 triliun. OJK menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan industri serta stabilitas sistem keuangan.

Sebagai tindak lanjut, PERBANAS dan OJK sepakat untuk melanjutkan dialog melalui beberapa forum teknis, termasuk forum pembahasan ketentuan perlindungan konsumen serta diseminasi *draft* standar keamanan teknologi yang tengah disusun oleh industri perbankan.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara regulator dan pelaku industri dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan ruang inovasi. Melalui sinergi yang konstruktif, PERBANAS terus memperkuat perannya sebagai jembatan strategis antara regulator dan industri guna memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung pertumbuhan sektor perbankan yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

PERBANAS Hadiri FGD Keuangan Berkelanjutan OJK: Memperkuat Peran Industri dalam Agenda Transisi Hijau

Focus Group Discussion (FGD) Keuangan Berkelanjutan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



PERBANAS menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Keuangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai forum dialog antara regulator dan pelaku industri dalam memperkuat implementasi agenda keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.

Dalam diskusi tersebut, OJK menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan bisnis lembaga keuangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Partisipasi PERBANAS dalam forum ini menegaskan komitmen industri perbankan untuk berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas dan daya saing sistem keuangan nasional.

Forum ini juga membahas penguatan kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan, termasuk pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penyempurnaan pelaporan keberlanjutan, serta peningkatan kapasitas lembaga jasa keuangan dalam mengelola risiko iklim dan risiko lingkungan.

Sebagai representasi industri perbankan nasional, PERBANAS menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penyalarsan kebijakan antarregulator, kejelasan panduan implementasi, serta penguatan kapasitas industri dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses bisnis perbankan.

From Commitment to Implementation: **Perkuat Integrasi TKBI dalam Proses Kredit**

4rd Workshop PERBANAS – Tropical Forest Alliance (WEF)
25 Februari 2026 | Griya PERBANAS

PERBANAS dan TFA menggelar Lokakarya Keempat untuk memastikan TKBI terintegrasi dalam proses kredit dan manajemen risiko, sehingga menjadi fondasi prudensial dan strategi bisnis bank –bukan sekadar klasifikasi keberlanjutan.



Lokakarya ini memperdalam penggunaan alat *portfolio screening* dan pendekatan *due diligence* untuk menilai risiko lingkungan dan deforestasi dalam portofolio pembiayaan perbankan. Pendekatan tersebut menghubungkan kerangka Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dengan proses analisis kredit, sehingga klasifikasi aktivitas hijau tidak hanya menjadi acuan kebijakan, tetapi juga didukung oleh proses verifikasi dan dokumentasi yang kuat dalam praktik pembiayaan.

Diskusi juga menyoroti pentingnya penggunaan analisis berbasis data, termasuk pemetaan risiko regional, penelusuran rantai pasok, dan pemantauan geospasial, untuk menilai potensi risiko pada sektor berbasis lahan seperti kelapa sawit, karet, dan komoditas pertanian lainnya.

Pendekatan ini memungkinkan bank melakukan *screening portofolio* secara lebih sistematis serta menyesuaikan tingkat *due diligence* berdasarkan tingkat risiko yang teridentifikasi.

*Risiko iklim bukan lagi
isu ESG semata,
melainkan risiko
keuangan arus utama.*





Selain penguatan manajemen risiko, lokakarya ini juga menyoroti peluang pembiayaan berkelanjutan melalui struktur pembiayaan inovatif yang mendukung produksi komoditas bebas deforestasi serta memperluas akses pembiayaan bagi petani kecil. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam proses kredit tidak hanya mendukung perlindungan ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan portofolio dan membuka peluang akses terhadap pendanaan hijau global.

Melalui kolaborasi berkelanjutan PERBANAS dan TFA, rangkaian lokakarya ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri perbankan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik pembiayaan sehari-hari, sekaligus mendukung transisi menuju sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan berketahanan iklim.

Menghubungkan Teori dan Praktik Perbankan: Corporate University IKPIA PERBANAS di BCA Learning Institute

11 Februari 2026 | BCA Learning Institute, Sentul



Sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman praktis mahasiswa terhadap industri perbankan, Sekolah Vokasi dan Profesi IKPIA PERBANAS menyelenggarakan kegiatan Corporate University (kunjungan industri) ke BCA Learning Institute, Sentul, pada 12 Februari 2026. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman langsung bagi mahasiswa untuk melihat implementasi praktik perbankan modern, khususnya di bidang *digital payment* dan teknologi perbankan.

Kunjungan ini diikuti oleh 58 mahasiswa, didampingi 5 dosen, serta perwakilan pengurus dan staf internal PERBANAS. Melalui sesi presentasi, site visit, dan diskusi interaktif bersama praktisi BCA, peserta memperoleh wawasan tentang profil perusahaan, inovasi *digital payment*, operasional perbankan, hingga peluang pengembangan karier di industri perbankan.

Materi yang disampaikan menyoroti berbagai inovasi digital banking, termasuk ekosistem *mobile banking*, QRIS, *open banking*, dan keamanan siber dalam sistem pembayaran modern. Selain itu, mahasiswa juga mendapat gambaran mengenai standar layanan perbankan, manajemen hubungan nasabah, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk berkarier di sektor keuangan.



Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan respon yang sangat positif dari peserta. Sebagian besar mahasiswa menilai materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, metode pembelajaran menarik, serta fasilitas pembelajaran yang sangat baik. Tingkat kepuasan keseluruhan mencapai 98,5% respon positif, menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan pengalaman pembelajaran yang bernilai bagi mahasiswa.

Melalui kegiatan Corporate University ini, IKPIA PERBANAS memperkuat komitmen untuk menjembatani pembelajaran akademik dengan praktik industri, sekaligus memperluas jejaring antara dunia pendidikan dan sektor perbankan. Kolaborasi seperti ini diharapkan dapat terus berkembang guna mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dinamika industri keuangan di masa depan.

Ikuti Update dari PERBANAS



perbanas.org



perbanas_official



PERBANAS

PERHIMPUNAN BANK NASIONAL

TIM KOMUNIKASI PERBANAS



Sekretariat PERBANAS
Griya Perbanas
Jl. Perbanas Karet Kuningan, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya



+62 21 5223038
+62 21 5255731



sekretariat@perbanas.org